



MAYORITARIANISME DAN KEKELIRUAN DEMOKRASI INDONESIA: KRITIK TERHADAP PRAKTIK POLITIK IDENTITAS KEAGAMAAN DALAM PEMILIHAN UMUM

Joshua Frans Kumowal^{1*}, Izak Y. M. Lattu², Agus Supratikno³

^{1,2,3}Universitas Kristen Duta Wacana

Abstract:

*This paper aims to criticize the practice of religious identity politics by candidates in the Indonesian general elections (Pemilu). The researcher uses a qualitative method with a collective case study approach. The results of the study found that the occurrence of religious identity politics in the Indonesian elections was caused by the tendency of the community to engage in politics laden with religious considerations. Additionally, the practice of religious identity politics by the majority correlates with majoritarianism. Number-based policy determinations, such as those in elections, can produce intersections that have the potential to shift political philosophy from democracy to majoritarianism. The analysis considers relevant theories in this study, such as the collaboration of the concepts of public reason from John Rawls and *wertrational* from Max Weber, the concept of identity politics from Francis Fukuyama, the concept of majoritarianism from Izak Y. M. Lattu, and the concept of democracy from Aristotle. In conclusion, borrowing Tan Malaka's term, the tendency of mystical logic in politics by society needs to be moderated through socialization and education to reduce the practice of religious identity politics in Indonesia. Furthermore, considering the potential of religion to provide positive contributions, the truth claims of religious groups in the political agenda need to be epistemically translated so that they are not exclusive.*

Keywords: *religious identity politics, elections, majoritarianism, democracy*

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk mengkritisi praktik politik identitas keagamaan oleh para kandidat dalam Pemilu Indonesia. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus kolektif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa terjadinya praktik politik identitas keagamaan dalam Pemilu Indonesia disebabkan oleh kecenderungan masyarakat berpolitik sarat dengan pertimbangan agama. Selain itu, praktik politik identitas keagamaan oleh mayoritas memiliki korelasi dengan mayoritarianisme. Penentuan kebijakan berbasis jumlah, seperti yang ada dalam Pemilu, dapat menghasilkan interseksi hingga berpotensi terciptanya pergeseran filosofi politik – dari demokrasi menuju mayoritarianisme. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan teori-teori yang relevan dalam penelitian ini, yaitu kolaborasi konsep *public reason* dari John Rawls dan *wertrational* dari Max Weber, konsep politik identitas dari Francis Fukuyama, konsep mayoritarianisme dari Izak Y. M. Lattu, dan konsep demokrasi dari Aristoteles. Kesimpulannya, meminjam istilah Tan Malaka, kecenderungan logika mistika dalam berpolitik di masyarakat perlu dimoderasi melalui sosialisasi dan edukasi untuk mereduksi praktik politik identitas keagamaan di Indonesia. Selain itu, mempertimbangkan potensi agama dalam memberikan kontribusi yang positif, klaim kebenaran kelompok keagamaan dalam agenda politik perlu diterjemahkan secara epistemik sehingga tidak bersifat eksklusif.

Kata kunci: politik identitas keagamaan, pemilu, mayoritarianisme, demokrasi

1 | **Korespondensi mengenai artikel dapat dilakukan kepada:**

*Joshua Frans Kumowal, UKSW

Email: 752021021@student.uksw.edu



PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika politik di Indonesia telah membangkitkan kesadaran ancaman dalam praktik politik identitas keagamaan di Indonesia. Presiden Indonesia, Joko Widodo, menghimbau para elite politik untuk tidak memanfaatkan politik identitas (diakses pada tanggal 20 Januari 2024). Pernyataan tersebut didorong oleh perhatiannya pada kestabilan situasi sosial dan ekonomi di masyarakat.

Meskipun demikian, beberapa pihak yang dimaksud tidak menerima gagasan tersebut. Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Ummat, secara terus terang menegaskan bahwa mereka akan memanfaatkan politik identitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 (diakses pada tanggal 22 Januari 2024). Selain itu, ditemukan juga pihak yang secara halus mengekspos afiliasi keagamaan untuk kepentingan politik. Ganjar Pranowo, salah satu Bacapres (Bakal Calon Presiden) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada saat itu, tampil dalam tayangan azan maghrib dari sebuah stasiun televisi (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/09/11/09360171/polemik-munculnya-ganjar-di-tayangan-azan-maghrib-penjelasan-pdi-p-d>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024). Walaupun dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah adanya indikasi pemanfaatan politik identitas, tetapi hadirnya seorang politikus dalam agenda keagamaan tanpa adanya urgensi selain membangun citra religius di masyarakat membuatnya sangat sarat dengan isu tersebut.

Selanjutnya, kampanye yang dilakukan pihak Anies Baswedan, sebagai Calon Presiden, sangat sarat dengan praktik politik identitas keagamaan. Secara individu, Anies Baswedan tidak pernah mengulurkan pernyataan-pernyataan yang terkait politik identitas keagamaan, tetapi para pendukungnya sangat sering ditemukan memanfaatkan legitimasi elemen-elemen religius. Seperti, pemanfaatan posisi keagamaan untuk mewajibkan penganutnya memilih Anies, serta pemanfaatan legitimasi langsung dari agama. Pengeluaran fatwa yang mewajibkan penganut Islam mendukung Anies menjadi Presiden oleh para Ulama di Jawa Barat (Jabar) (diakses pada tanggal 3 Februari 2024). Selanjutnya, pernyataan Dadang Muliawan, Wakil Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jabar, yang menegaskan bahwa kekalahan Anies pada Pilpres merupakan dosa (<https://www.viva.co.id/trending/1681954-viral-kampanye-ustaz-dadang-muliawan-amin-menang-wajib-amin-kalah-dosa>, diakses pada tanggal 3 Februari 2024). Meskipun tidak terkait secara langsung, tindakan pembiaran Anies



terhadap para pendukungnya untuk keuntungan dalam Pilpres membuatnya terintegrasi ke dalam praktik politik identitas keagamaan. Pada akhirnya, pelaksanaan Pemilu selalu terikat dengan praktik politik identitas keagamaan.

Suara terbanyak menjadi elemen terpenting pada penentuan kebijakan dalam sistem demokrasi. Kondisi seperti ini menciptakan kecenderungan bagi para elite politik yang berkontestasi di Pemilu untuk memanfaatkan politik identitas keagamaan. Afiliasi kepada kelompok keagamaan terbesar dibutuhkan untuk memperoleh dukungan terbanyak. Meskipun memberi pengaruh yang signifikan, ancaman yang timbulkan pada masyarakat akibat penggunaan politik identitas keagamaan sangat perlu dipertimbangkan dengan bijak.

Tulisan ini berusaha mengungkap orientasi tipe tindakan sosial masyarakat berdasarkan nilai absolut (*wertrational*) sebagai *public reason* mendorong pemanfaatan politik identitas keagamaan dalam kontestasi Pemilu. Selain itu, menguatnya mayoritarianisme sebagai determinasi eksploitasi identitas keagamaan untuk kepentingan para elite menjadi kekhawatiran yang diperhatikan oleh peneliti. Argumentasi utama dalam artikel ini adalah politik identitas keagamaan akan selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan karena menawarkan hasil signifikan. Sebab itu, meminjam istilah Tan Malaka (1943), masyarakat perlu dimoderasi dari kecenderungan logika mistika dengan harapan mereduksi praktik politik identitas keagamaan di Pemilu Indonesia. Tulisan ini mengkolaborasikan teori *public reason* dari Rawls (2000) dan teori orientasi rasionalitas masyarakat berdasarkan nilai absolut (*wertrational*) dari Weber (1947) untuk membangun diskusi yang dapat menjelaskan fenomena menguatnya praktik politik identitas keagamaan di Indonesia. Konsep Fukuyama (2018) juga digunakan untuk menguak ancaman di dalam praktik politik identitas oleh mayoritas. Selanjutnya, konsep mayoritarianisme yang digunakan untuk membangun diskursus dalam karya ilmiah ini sarat dengan pemikiran Lattu (2023). Tulisan ini juga dipengaruhi oleh gagasan Aristoteles (1992) terhadap demokrasi.

METODE PENELITIAN

Investigasi dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah studi kualitatif, dengan pendekatan studi kasus kolektif. Kasus-kasus yang representatif



telah ditentukan untuk menggambarkan isu yang dimaksud (Creswell 2013). Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan teks-teks bereputasi yang memuat informasi terkait dengan topik bahasan tulisan ini, seperti surat kabar, buku, dan artikel. Data-data yang ditemukan diuji dengan memanfaatkan teknik triangulasi sumber, yaitu pertimbangan kembali informasi-informasi yang ditemukan selama penelitian pada sumber-sumber yang berbeda dan melakukan komparasi secara mendalam untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif (Sugiyono 2013:270-275).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguatnya Praktik Politik Identitas Keagamaan di Indonesia

Pemilu di Indonesia sarat dengan praktik politik identitas keagamaan. Hal tersebut tidak lepas dari determinasi kenaikan dukungan yang signifikan terhadap para calon legislatif dan eksekutif yang memanfaatkan aspek religiusitas pada pelaksanaan kampanye. Politik identitas merupakan gerakan politik yang memprioritaskan perhatiannya kepada perbedaan (*different*) (Habibi 2017). Pada dasarnya, secara etimologi, istilah identitas berasal dari bahasa Latin dengan arti persamaan. Meski demikian, di dalam identitas terdapat aspek lainnya, yaitu perbedaan dengan yang lain (Lawler 2014:10). Secara singkat, politik identitas keagamaan berarti memanfaatkan identitas religius sebagai sumberdaya dan sarana dalam agenda politik. Mengutip hasil penelitian Gani, politik identitas keagamaan merupakan unsur terpenting dari kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2017. Argumentasi tersebut dibangun dengan melihat daerah-daerah mayoritas muslim paling banyak memilih Anis-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Ditemukan bahwa pasangan Anis-Sandi memperoleh kemenangan di daerah-daerah mayoritas muslim (Fernandes 2018). Selaras dengan Gani, Triantoro juga menemukan adanya tendensi dari pasangan tersebut untuk menegaskan afiliasi mereka dengan agama Islam melalui akun sosial media mereka – pernyataan-pernyataannya seperti, “dekat dengan Allah”, “beriman”, dan “berpeci” (Triantoro 2019). Pernyataan-pernyataan tersebut memperkuat posisi mereka sebagai calon pemimpin Islami. Pasangan Anis-Sandi sering diintegrasikan oleh pendukungnya sebagai wakil dari kelompok agama Islam.



Hal ini berbanding terbalik dengan lawan politiknya pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang cenderung mendapatkan kecaman dari kelompok Islam konservatif dengan puncaknya pada pengangkatan kasus “penistaan agama”. Determinasi latar belakang agama menjadi sangat signifikan dalam penentuan Gubernur Jakarta pada saat itu.

Pemilihan Presiden Indonesia 2019 tidak lepas juga dari penggunaan dan pengaruh praktik politik identitas keagamaan. Prabowo Subianto, salah satu calon Presiden pada saat itu, sering ditunjukkan begitu dekat dengan kelompok Islam radikal. Romantisme Prabowo dan kelompok Islam fundamental dapat terlihat melalui pertemuan-pertemuannya dengan para petinggi kelompok keagamaan tersebut hingga penandatanganan perjanjian. Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi Islam fundamental, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Front Pembela Islam (FPI), dan PA (Presidium Alumni) 212. Hubungan ini menciptakan beberapa kesepakatan, seperti pernyataan dukungan penuh kepada pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno serta penerimaan 17 poin perjanjian yang diberikan GNPF Ulama (<https://news.detik.com/berita/d-5126563/riwayat-hubungan-prabowo-dan-pa-212>, diakses pada tanggal 3 Februari 2024). Di sisi lain, Joko Widodo (Jokowi), calon Presiden pada saat itu, juga memanfaatkan identitas keagamaan dalam manuver politiknya. Penggantian dari Mahfud MD kepada Ma'ruf Amin sebagai calon wakil Presiden dari pihak Jokowi sarat dengan keinginan untuk merebut suara dari pemilih beragama Islam. Sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin pernah menjabat sebagai Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta beberapa posisi penting lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. Pengalaman pada posisi strategis tersebut membuat keberadaannya sebagai calon wakil Presiden sangat berpengaruh dalam menarik simpati para pemilih religius, terlebih khusus yang beragama Islam. Meskipun mendapatkan kecaman, tindakan tersebut justru menghasilkan peningkatan dukungan masyarakat terhadap Jokowi. Dalam tulisannya, Fernandes (2018) menolak adanya efisiensi penggunaan praktik politik identitas agama pada Pemilu 2019, tetapi argumentasi tersebut sangat sulit diterima dengan mempertimbangkan bahwa semua kubu calon Presiden pada saat itu sama-sama memanfaatkan hal tersebut. Para pasangan calon Presiden pada saat itu saling berusaha



untuk mengafiliasikan diri dengan kelompok keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Islam. Secara keseluruhan, aspek religiusitas secara faktual masih menjadi pertimbangan utama sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menentukan preferensinya pada urusan politik.

Mengungkap Ancaman Orientasi Agama dalam Diskursus Politik

Besarnya minat terhadap penggunaan praktik politik identitas keagamaan oleh para elite yang diikuti keberhasilannya dalam menarik simpati publik menunjukkan betapa besarnya pengaruh agama dalam diskursus politik. Rawls (2000) mengemukakan bahwa di dalam masyarakat, terdapat dasar moral dan nilai politik yang berpengaruh dalam wacana politik – disebutnya sebagai *public reason* (nalar publik). Rawls beranggapan bahwa cara masyarakat memahami dan menginterpretasikan relasi politiknya merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut, *Public reason* berlaku pada beberapa diskursus politik dalam forum publik – seperti, dalam konteks ini, wacana para kandidat jabatan publik dan pelaksana kampanyenya, khususnya dalam pidato publik, platform partai, dan pernyataan politik. Di Indonesia, diskursus politik sarat dengan determinasi agama. Rasionalitas masyarakat seperti itu tercermin pada konsep orientasi sosial berdasarkan nilai absolut (*wertrational*) yang ditawarkan oleh Weber (1947). Menurut Weber, ada empat rasionalitas sosial (biasa disebut sebagai tipe tindakan sosial) yang memengaruhi tindakan masyarakat, yaitu yang didasarkan pada tujuan (*zweckrational*), nilai absolut (*wertrational*), afektif, dan tradisional. Perbedaan tersebut bukan untuk memisahkan orientasi yang satu dengan yang lain – membuatnya hanya terbatas pada salah satu orientasi dalam masyarakat – tetapi, untuk melihat kecenderungan dalam suatu lingkup sosial. Secara khusus, tindakan sosial yang didasarkan pada nilai absolut melibatkan keyakinan terhadap suatu prinsip yang mutlak – seperti pada agama – untuk kepentingannya sendiri. Dalam gagasan tersebut, tindakan selalu melibatkan ‘perintah’ atau ‘tuntutan’ yang harus dipenuhi oleh aktor yang merasa bertanggung jawab. Selaras dengan gagasan-gagasan tersebut, peran masyarakat untuk memberikan ruang kepada nilai-nilai religius dalam wacana-wacana politik menjadi salah satu faktor utama hadirnya politik identitas keagamaan di Pemilu Indonesia. Dalam situasi tersebut, para kandidat dapat dengan mudah memberikan arahan yang mengakomodasi kepentingan politiknya, terutama jika dikemas dalam



bingkai keagamaan. Dengan demikian, hadirnya politik identitas keagamaan tidak lepas dari simbiosis pendukung dan yang didukung – para elite politik dan masyarakat memiliki peran yang sama besarnya dalam melanggengkannya.

Menguatnya praktik politik identitas keagamaan di Indonesia berakar dari minat kelompok agama mayoritas mendapatkan pengakuan dalam ranah politik. Fukuyama (2018) berpendapat bahwa gerakan politik identitas berasal dari keinginan seseorang atau kelompok untuk diakui. Teori tersebut dikonstruksikan atas dasar pertimbangan kasus-kasus terkait dan konsep *thymos* dalam jiwa manusia. *Thymos* merupakan salah satu bagian jiwa yang menurut Sokrates berkaitan dengan kemarahan dan kebanggaan.(Fukuyama 2018) Kerangka kerja politik identitas dalam konsep Fukuyama adalah sebuah fenomena politik yang lahir dari kemarahan dan ketidakpuasan yang timbul akibat diabaikan atau diremehkan. Jika pada kelompok marginal politik identitas menjadi sarana untuk menuntut penghargaan dan pengakuan terhadap kesetaraan hak, maka pada kelompok mayoritas cenderung bergeser pada dorongan keinginan untuk diakui sebagai yang superior. Karena itu, gerakan politik identitas oleh kelompok dominan erat kaitannya dengan mayoritarianisme. Tampakdalamhal ini agama sangat berjasa bagi mereka.(Boangmanalu and Warseto Freddy Sihombing 2023)

Mayoritarianisme di Indonesia hadir bersamaan dengan kesadaran terhadap demokrasi. Hefner menyebut fenomena ini sebagai *majoritarian turn* (Hefner 2020). Keterbukaan dalam politik demokrasi menyediakan jalan bagi kelompok Islam konservatif mempertegas dominasinya dalam ruang publik. Peristiwa kampanye pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 dan kampanye pemilihan Presiden tahun 2019 menjadi puncak krisis mayoritarian di Indonesia.

Fenomena mayoritarianisme agama terjadi dalam berbagai bentuk. Secara nasional, ada kelompok Islam fundamental yang berusaha mendominasi urusan sosial-politik, tetapi, dalam lokasi-lokasi yang lebih spesifik, ditemukan kelompok agama lain dengan upaya serupa. Di Manokwari, determinasi umat Kristen mendominasi penentuan kebijakan publik. Kekristenan merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar di Papua. Orang-orang berlatar belakang agama Kristen banyak mengisi posisi strategis dalam jabatan pemerintahan. Terdapat klaim sepihak dari para rohaniawan bahwa Papua identik dengan Kekristenan (Hutabarat 2017). Meskipun Kekristenan di



Indonesia begitu kecil ketika dibandingkan dengan kelompok agama Islam, penentuan kebijakan di Manokwari sangat sarat oleh pertimbangan-pertimbangan religius Kristen. Salah satu praktik politik identitas keagamaan Kristen dapat ditemukan dalam pemilihan Bupati. Identitas Kristen, seakan-akan, menjadi syarat absolut memenangkan pemilihan Bupati. Pihak-pihak yang memenangkan suara dalam pemilihan Bupati selalu berlatar belakang agama Kristen. Bahkan, pada periode 2010 hingga 2015, Bupati yang terpilih berlatar belakang pendeta dari salah satu sinode gereja (Saputra 2017). Selain itu, adanya Perda (Peraturan Daerah) Injili turut melanggengkan mayoritarianisme berbasis Kekristenan di Manokwari.

Selanjutnya, di Bali, mayoritarianisme termanifestasi lewat upaya diferensiasi dari masyarakat Hindu-Dharma. Pada dasarnya, ajaran agama Hindu Bali mengandung nilai-nilai filosofis yang bersifat inklusif. Terdapat konsep *Tri Hita Karana* yang mendorong penganutnya menciptakan keselarasan dalam bermasyarakat. *Tri Hita Karana* atau “Tiga Penyebab Kedatangan Kebahagiaan” merupakan upaya meraih kebahagiaan dengan menjaga keseimbangan dalam berbakti kepada Tuhan, melayani sesama, dan merawat alam lingkungan sesuai dengan ajaran agama (Purana 2016). Meskipun memiliki fondasi yang sesuai dalam konstruksi kohesi masyarakat, namun terdapat upaya dari beberapa pihak dengan latar belakang Hindu Bali untuk menciptakan ketidaksetaraan kelompok masyarakat berbasis agama di ruang publik. Konstruksi penduduk asli dan pendatang melalui Desa Adat – terdapat aturan yang menciptakan segregasi di masyarakat dengan identifikasi Krama Desa (warga setempat dengan latar belakang agama Hindu), Krama Tamiu (warga beragama Hindu, tetapi hanya berdomisili), dan Tamiu atau tamu (warga setempat yang tidak beragama Hindu) – dan, Ajeg Bali yang terhubung dengan identitas keagamaan melahirkan kesenjangan sosial (Ifani et al. n.d.:28-29). Kedua wacana tersebut, sebenarnya, berhubungan dengan upaya untuk memperkuat identitas dan warisan budaya Bali, tetapi dalam pelaksanaannya justru mengukuhkan narasi-narasi kontroversial terhadap eksistensi kelompok-kelompok agama lain.

Indonesia memiliki sebuah kerangka *covenantal pluralism* yang bertujuan untuk memelihara kesatuan dalam masyarakat dengan menghargai kebebasan dan hak-hak individu lainnya, namun munculnya mayoritarianisme menciptakan tantangan terhadap konsep tersebut (Lattu 2023). Romantisme *public reason* dan pertimbangan kelompok

8 | *Mayoritarianisme dan Kekeliruan Demokrasi Indonesia: Kritik Terhadap Praktik Politik, ...*

Joshua Frans Kumowal, Izak Y. M. Lattu, Agus Supratikno

Jurnal Christian Humaniora | <http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/humaniora>



agama mayoritas semakin menimbulkan pertanyaan tentang keadilan terhadap kelompok kecil dalam masyarakat. Mayoritarianisme yang mengakar pada radikalisme agama di Indonesia menciptakan konsep “toleransi tanpa kesetaraan” (*tolerance without recognition*) (Lattu 2023). Hal ini merujuk kepada penerimaan disertai dengan hegemoni kelompok dominan – baik secara struktural maupun pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Akhirnya, walaupun kehadiran para elite politik semata-mata hanya memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan politik, tetapi pelaksanaan praktik politik identitas keagamaan menjadi sarana terpenting dalam merealisasikan dan melanggengkan mayoritarianisme di masyarakat.

Mengembalikan Demokrasi dari Mayoritarianisme

Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut jelas terlihat di dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pasal 1 ayat 2, yang menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat.” Selain itu, Soekarno juga pernah mempertegasnya dengan menggunakan istilah “*democracy*” untuk menerjemahkan sila ke-4 dari Pancasila ke dalam bahasa Inggris, tahun 1956. Prinsip demokrasi dalam negara dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan representatif. Demokrasi langsung merupakan sebuah sistem politik di mana para warga ikut terlibat mempertimbangkan pengesahan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Namun, sistem tersebut akan sulit untuk diterapkan di Indonesia karena besarnya jumlah penduduk dan kompleksitas isu yang tidak semua dapat dicerna oleh setiap kalangan masyarakat. Indonesia memanfaatkan prinsip demokrasi representatif dalam menjalankan sistem politiknya. Masyarakat berhak memilih wakilnya dalam pembentukan kebijakan politik yang diinginkannya. Dengan demikian, Pemilu merupakan perwujudan dari sistem demokrasi itu sendiri (Maria and Marendra 2020:8).

Dalam Pemilu, suara terbanyak merepresentasikan kedaulatan rakyat. Situasi tersebut mendorong para elite bersaing menarik dukungan masyarakat sebanyak mungkin. Proses penarikan perhatian pada masyarakat diupayakan melalui diskursus minat dan rancangan politik para kontestan Pemilu dengan warga negara. Strategi dan perencanaan komunikasi politik untuk kemenangan dalam Pemilu termanifestasi melalui kampanye. Secara sederhana, kampanye politik merupakan usaha terstruktur



yang bertujuan memengaruhi penentuan keputusan suatu kelompok (Fatimah 2018). Keberadaan kampanye memberi dampak signifikan dalam demokrasi representatif karena mengintegrasikan masyarakat dan pihak-pihak penerima kekuasaan. Kampanye diatur sedemikian rupa agar dapat menjadi sarana penyampaian kemampuan atau prestasi. Para kontestan politik akan bersaing dalam menarik simpati masyarakat melalui diskursus argumentasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui pihak yang layak menerima kekuasaan dan merekomendasikannya melalui Pemilu. Namun, karena dorongan kepentingan memenangkan Pemilu sangat besar, situasi tersebut menciptakan kecenderungan para elite politik membangun persona yang mengafiliasikan dirinya ke dalam identitas kelompok masyarakat terbesar secara kuantitas – agama dalam konteks Indonesia. Efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan politik identitas keagamaan begitu seksi dalam kontestasi politik. Politik identitas keagamaan dapat mendorong para kandidat mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas melalui janji-janji politik, menyebabkan sarat keberpihakan pada mayoritas di saat mereka memegang kekuasaan. Dalam hal ini, kelompok minoritas semakin termarginalisasi untuk berpartisipasi dalam urusan politik, menciptakan peminggiran yang terstruktur. Kondisi semacam ini menciptakan pergeseran prinsip politik – dari demokrasi menuju mayoritarianisme.

Pada dasarnya, demokrasi dan mayoritarianisme merupakan dua substansi yang berbeda. Demokrasi merupakan sistem politik yang sangat populer di era modern. Lebih dari seratus negara telah menerapkan prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahannya di abad ke-20 dan terus berlanjut hingga abad ke-21 (Patrick n.d.:5). Walaupun meningkat dengan pesat di era modern, sistem demokrasi bukanlah sebuah ‘produk’ yang relatif baru (de Benoist 2011:12). Demokrasi telah ada di kota-kota Yunani kuno sebagai alternatif dari sistem politik oligarki, monarki, atau autokratis yang lebih dikenal pada saat itu. Penetrasi sistem politik demokrasi ke dalam rezim modern ditandai dengan direalisasikannya kembali republikanisme Romawi di abad ke-16 dan ke 17, kemudian makin diperhatikan dengan adanya Revolusi Prancis dan Amerika (Bernard 2002:5). Walaupun tidak seperti demokrasi yang lebih banyak diketahui di masa sekarang ini – berkaitan dengan penyangkalan bahwa semua orang berhak memilih dengan alasan yang logis – tetapi, penekanannya terhadap kewajiban semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan



urusan negara. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi berkedaulatan pada semua warga negara merdeka (Aristotle 1992:243-245). Seluruh masyarakat diberikan ruang partisipasi dalam penentuan kebijakan publik. Di sisi lain, mayoritarianisme merupakan prinsip politik yang menolak nilai kesetaraan semua warga negara (Lattu 2023). Kelompok mayoritas menjadikan dirinya sebagai penentu nilai dan norma yang berlaku (Jones 2021). Prinsipnya, demokrasi berorientasi pada preferensi rakyat, sedangkan mayoritarianisme berorientasi pada preferensi mayoritas. Meskipun berbeda, penentuan kebijakan berbasis kuantitas menciptakan interseksi dua kerangka filosofi politik tersebut.

Di Indonesia, penentuan kebijakan seringkali dijalankan atas dasar mayoritarianisme. Argumentasi tersebut tidak menyiratkan bahwa masyarakat tidak memahami demokrasi, melainkan menyatakan kekeliruan pada implementasi proses penetapan regulasi yang berbasis minat mayoritas begitu kuat dan memaksa. Selain isu praktik politik identitas keagamaan dalam Pemilu yang sudah dijabarkan sebelumnya, perkara tuntutan hukum kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kelompok fundamentalisme Islam atas dasar penistaan agama juga dapat memberikan deskripsi yang konkret terhadap gagasan tersebut. Saat itu, video pidato kontroversial dari Ahok yang menyinggung teks Al-Quran diunggah ke media sosial, mengundang perhatian banyak pihak. Kasus tersebut berlanjut pelaporan oleh kelompok ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) ke Bareskrim Polri atas dasar tuduhan pelecehan agama, lalu berakhir pada putusan bersalah oleh hakim pada 9 Mei 2017 (<https://news.detik.com/berita/d-3496447/kisah-pidato-di-pulau-seribu-yang-bawa-ahok-ke-cipinang>, diakses pada tanggal 3 Februari 2024). Meskipun diproses sesuai prosedur, pengesahan kebijakan tersebut sangat kontroversi karena sarat dengan determinasi mentalitas aparat penegak hukum pada saat itu (Maruapey 2017). Hal tersebut berkaitan dengan desakan publik, yang terwujud dalam demonstrasi massa dengan jumlah yang sangat besar. Kasus Ahok begitu kompleks, sehingga seharusnya ditentukan atas dasar prinsip *in dubio pro reo*, yakni keputusan yang ditentukan harus berpihak pada terdakwa jika terdapat keraguan dalam bukti-bukti suatu kasus (Ginting 2017). Toruan menyebut fenomena ini sebagai *trial by the mob* (pengadilan massa), di mana putusan hakim terindikasi dipengaruhi oleh faktor desakan masyarakat banyak (Toruan 2009). Dengan demikian, salah satu

11 | *Mayoritarianisme dan Kekeliruan Demokrasi Indonesia: Kritik Terhadap Praktik Politik, ...*
Joshua Frans Kumowal, Izak Y. M. Lattu, Agus Supratikno
Jurnal Christian Humaniora | <http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/humaniora>



ciri yang mencolok dari mayoritarianisme – yang membedakannya dengan demokrasi – ialah pemanfaatan ruang publik oleh mayoritas sebagai sarana pembungkaman kelompok masyarakat yang tidak berdaya.

Lebih lanjut, interpretasi kedaulatan rakyat dalam demokrasi sering diintegrasikan ke dalam kehendak mayoritas. Pada titik tertentu, angka secara faktual memengaruhi penentuan kebijakan. Hal tersebut seperti yang direpresentasikan dalam Pemilu, yaitu pihak penerima dukungan terbanyak yang memegang kekuasaan. Permasalahan tirani mayoritarian kerap dinyatakan sebagai dampak eksistensi demokrasi. Meskipun demikian, selaras dengan Aristoteles, pembatasan demokrasi hanya pada konsep mayoritas yang berdaulat merupakan sebuah kekeliruan (Pada bagian ini, Aristoteles mencoba menarik perbedaan antara demokrasi dan oligarki. Dalam penegasannya, determinasi jumlah tidak saja berlaku dalam sistem konstitusi demokrasi, tetapi juga oligarki, pada situasi-situasi tertentu. Aristotele 1992:244). Prinsip demokrasi perlu dikembalikan pada pengertian dasarnya, yaitu berkedaulatan rakyat – setiap masyarakat memiliki kontribusi dalam proses menentukan kebijakan publik. Mayoritarianisme bukanlah representasi demokrasi, melainkan sebuah tantangan terhadapnya (Lattu 2023). Secara substansial, dibutuhkan pemikiran kritis yang logis dari masyarakat untuk sampai pada pemahaman tersebut.

Mayoritarianisme di Indonesia menguat karena kecenderungan pertimbangan agama dalam logika masyarakat. Keberadaan logika religius dalam kehidupan politik berpotensi mengarahkan demokrasi kepada mayoritarianisme. Meskipun nilai-nilai dalam suatu agama dipercayai mengarah kepada kebaikan, determinasinya dalam agenda politik dapat mendiskriminasi pihak-pihak lainnya. Secara umum, ajaran agama sarat dengan ideologi yang diangkat melalui interpretasi narasi-narasi suci dan dikristalisasikan sebagai doktrin. Pengakuan suatu agama secara tidak langsung mengimplikasikan penerimaan terhadap sebuah penjelasan khusus dalam memahami situasi, permasalahan, dan solusi karena adanya *truth claim* yang melekat di dalamnya (Yandell, 2002:56). Penerapan nilai-nilai religius secara absolut dapat menyebabkan ketidakseimbangan ketika diterapkan pada masyarakat majemuk karena doktrin suatu agama bersifat subjektif dan terbatas – tidak mampu merepresentasikan kebutuhan pihak-pihak di luar agama tersebut. Kebijakan politik semestinya dirumuskan melalui diskursus yang dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan secara publik, serta

12 | *Mayoritarianisme dan Kekeliruan Demokrasi Indonesia: Kritik Terhadap Praktik Politik, ...*
Joshua Frans Kumowal, Izak Y. M. Lattu, Agus Supratikno
Jurnal Christian Humaniora | <http://e-journal.iakntarutung.ac.id/index.php/humaniora>



dievaluasi oleh kelompok masyarakat yang kalah secara kuantitas (Supratniko 2023:14). Selain itu, meskipun ini bersifat kritis, sesuai dengan gagasan Gramski (dikutip dari, Adian 2011:46), pemutlakan nilai-nilai agama berpotensi memberikan ruang bebas bagi para elite agama dan politik yang berkepentingan memainkan dan memodifikasi ideologi tersebut untuk mencapai atau mempertahankan hegemoni. Oleh karena itu, sistem demokrasi yang dijalankan hanya dengan pertimbangan suatu agama sangat beresiko mengalami kekeliruan dalam implementasinya.

Pada akhirnya, moderasi agama dalam ranah politik sangat dibutuhkan untuk mereduksi ketidaksetaraan. Penalaran agama dalam ruang-ruang politik menjadi salah satu penyebab lahir dan meningkatnya mayoritarianisme di Indonesia. Meminjam istilah Tan Malaka (1943), masyarakat perlu mereduksi logika mistika untuk mencapai kebahagiaan bangsa secara kolektif. Meskipun demikian, peneliti meyakini bahwa nilai-nilai agama masih memiliki potensi yang positif. Selaras dengan itu, Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang mengakomodasi peran agama sebagai salah satu landasan filosofi negara (Supratniko 2023:30-31). Tentunya hal tersebut berbanding sangat jauh dengan konsep materialis Tan Malaka. Namun, selaras dengan Habermas (2005), masyarakat beragama perlu mengembangkan sikap epistemik untuk berkontribusi dalam diskursus ruang publik. Klaim kebenaran yang dibawa kelompok keagamaan perlu 'diterjemahkan' sehingga tidak tergantung pada sumber-sumber agama tertentu (dikutip dari, Calhoun 2011). Dibutuhkan filterisasi wacana religius sebelum masuk ke dalam pertimbangan yang dapat memengaruhi kebijakan politik. Karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi tentang rasionalitas dalam berpolitik pada masyarakat untuk mereduksi eksploitasi elemen-elemen agama secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Praktik politik identitas keagamaan di Indonesia menguat karena didorong oleh besarnya pertimbangan agama dari masyarakat dalam diskursus politik. Mayoritarianisme yang teridentifikasi melalui praktik politik identitas keagamaan, perlu ditanggapi sebagai tantangan yang serius bagi demokrasi, merujuk pada keberpihakan mayoritas dan peminggiran minoritas. Karena itu, moderasi agama dalam politik menjadi krusial untuk mereduksi ketidaksetaraan. Diperlukan pengembangan



sikap epistemik masyarakat beragama dan filterisasi wacana religius untuk mereduksi pengaruh eksploitasi elemen-elemen agama dalam kebijakan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Donny Gahral. 2011. *Setelah Marxisme*. edited by F. Hadinata and D. Muhammad. Depok: Penerbit Koekoesan.
- Aristotle. 1992. *The Politics*. St Ives: Penguin Group.
- de Benoist, Alain. 2011. *The Problem of Democracy*. edited by J. B. Morgan. Arktos Media.
- Bernard, Crick. 2002. *Democracy: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Boangmanalu, Flesia Nanda Uli, and Seri Antonius Warseto Freddy Sihombing. 2023. "Status Beragama versus Hidup Beragama." *Areopagus: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Teologi* 21(1):45–56.
- Calhoun, Craig. 2011. "Afterword: Religion's Many Powers." in *The Power of Religion in the Public Sphere*, edited by E. Mendietta and J. VanAntwerpen. New York.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Third Edit. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fatimah, Siti. 2018. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1(1):5–16. doi: 10.32699/resolusi.v1i1.154.
- Fernandes, Arya. 2018. "Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi Dan Efektivitas." *CSIS Election Series* (1).
- Fukuyama, Francis. 2018. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Ginting, Sryani Br. 2017. "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok." *Jurnal Law Pro Justitia* II(2):65.
- Habermas, Jürgen. 2005. "Religion in the Public Sphere." in *Holberg Prize Seminar*.
- Habibi, Muhammad. 2017. "Analisis Politik Identitas Di Indonesia." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* 1(3):1–22. doi: 10.13140/RG.2.2.16590.66887.
- Hefner, Robert W. 2020. "Islam and Covenantal Pluralism in Indonesia: A Critical Juncture Analysis." *Review of Faith and International Affairs* 18(2):1–17.



- Hutabarat, Binsar Antoni. 2017. "Perda Manokwari Kota Injil: Makna Dan Konsekuensi Bagi Gereja-Gereja Di Indonesia." *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 2(1):127. doi: 10.33550/sd.v2i1.58.
- Ifani, Inggrit, Rahman Mantu, Yohanes Victor, Lasi Usbobo, Iif Fakhriyati Ihsani, and Pustaka Masyarakat Setara. n.d. "Dinamika Toleransi Dalam Mayoritarianisme Agama Di Tingkat Lokal."
- Jones, Sidney. 2021. "The Rise of Islamist Majoritarianism." in *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Oppurtunities for Democracy*, edited by C. Formichi. Ithaca: Cornell University.
- Lattu, Izak Y. M. 2023. "Menggugat Majoritarianisme, Menegaskan Covenantal Pluralism Indonesia." Pp. 236–45 in *Riwanto Tirtosudarmo dan Nasionalisme yang Lebih Rileks*, edited by F. D. B. Hera and G. B. Aji. Jakarta: Kompas.
- Lawler, Steph. 2014. *Identity*. Second. St Ives: Polity Press.
- Malaka, Tan. 1943. *Madilog*. Koleksi Rowland.
- Maria, Linlin, and Dion Marendra. 2020. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. edited by N. Rachmana, Nandang, and A. Sunarya. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Maruapey, M. Husein. 2017. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VII(1):10.
- Patrick, John J. n.d. *Understanding Democracy*. JusticeLearning.org.
- Purana, I. Made. 2016. "Pelaksanaan Tri Hita Karana Dalam Kehidupan Umat Hindu." *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra* 5(2085):67–76.
- Rawls, John. 2000. *The Law of Peoples: With" The Idea of Public Reason Revisited"*. Harvard University Press.
- Saputra, Muhammad Ali. 2017. "Menguatnya Politik Identitas Dan Problem Kerukunan Beragama Di Manokwari." *Mimikri* 3:15–27.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Supratikno, Agus. 2023. *Agama Dan Politik*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Toruan, Gerald Theodorus L. 2009. "Fenomena Trial By The Mob (Pengadilan Massa) Dalam Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Ditinjau Dari Aspek Hukum." (September 2016):1035–48.



Triantoro, Dony Arung. 2019. “Praktik Politik Identitas Dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi.” *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 16(1):19–40. doi: 10.24002/jik.v16i1.1495.

Weber, Max. 1947. *Max Weber: The Theory Social and Economic of Organization*. edited by T. Parsons. Glencoe: The Free Press.

Yandell, Keith E. 2002. *Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction*. New York: Routledge.